

SELAMAT
HARI RAYA

Nyepi

Tahun Baru Saka 1945
22 Maret 2023

Pimpinan dan Anggota
DPRD KABUPATEN SLEMAN
Mengucapkan

Selamat Hari Raya Nyepi

ARIF KURNIAWAN, S.A.G., M.M.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

HARIS SUGIHARTO, S.I.P.
Ketua DPRD Kabupaten Sleman

HR. SUKAPUTRA, S.N.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

TIRI WIGUNO, S.E.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

PROMO SENAM HAMIL

Benefit:

- Konsultasi seputar ASI
- Welcome drinks (jus buah)
- Susu ibu hamil

Rp30.000
Rp25.000

Jadwal senam hamil setiap hari Selasa, Jumat, & Sabtu
pukul 16.00-17.30 WIB

08118550060

Xedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

krjogja.com

www.krjogja.com

Koran Merapi

Tuntas Tanpa Tendensi

Prodi Kebidanan Gelar Kuliah Pakar

SEMARANG (KR) - Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang (Fikkes Unimus) menggelar Kuliah Pakar ‘Penapisan Awal Akseptor KB Dalam Proses Konseling Keluarga Berencana’, Minggu (19/3). Kuliah pakar yang dibuka Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd dan Dekan Fikkes Dr Ali Rosidi MSi ini menampilkan 3 pembicara, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat Dr Zulvy Wiyanti SST MKes, Ketua IBI Kota Semarang Istirochah SSitBd MKes dan dosen Kebidanan Fikkes Unimus Erna Kusumawati SST MKes.

Rektor Prof Dr Masrukhi MPd mengapresiasi prodi kebidanan dengan kuliah pakar sejalan dengan Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa bisa menyerap ilmu dan pengalaman dari 3 praktisi atau narasumber. Kuliah pakar bisa meningkatkan kualitas mahasiswa kebidanan Unimus. **(Sgi)-d**

ALAMI KECELAKAAN DI TOL PEMALANG
Pebulutangkis Syabda Belawa Tewas

Syabda Perkasa Belawa

SRAGEN (KR) - Atlet bulutangkis Indonesia, Syabda Perkasa Belawa, tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Pemalang, Senin (20/3) pagi. Iro-nisnya, pebulutangkis asli Desa Sumberejo Kecamatan Mondokan Sragen ini rencananya mudik ke Sragen dalam rangka takziah neneknya yang meninggal.

Namun saat perjalanan ke Sragen, mobil yang dinaiki Syabda bersama keluarganya mengalami kecelakaan di Pemalang. Syabda dan ibu dikabarkan meninggal, sementara ayah dan kakaknya selamat.

Paman korban, Taufiq Ismadi saat dikonfirmasi membenarkan kabar kecelakaan yang menimpa atlet Pelatnas PBSI bersama keluarganya. "Berita yang kami peroleh, Syabda dan ibunya meninggal. Sementara ayah dan kakak selamat. Rencananya mau mudik Sragen takziah, karena neneknya meninggal," ujarnya.

Menurut Taufiq, rencananya jenazah Syabda dan ibunya dibawa ke Mondokan Sragen untuk dimakamkan. "Kalu dari pihak keluarga, mau dikuburkan di sini (Mondokan) sekalian. Bareng ibu dan neneknya sekalian, jadi tiga pemakaman sekaligus," jelasnya. **(Sam)-d**

KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

Tanggal	Kurs Jual
17/3	15.441
18/3	15.495
19/3	15.550
20/3	15.495

Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Multi Authorized Money Changer Telp. (0274) 547688

PERINGATI HARI PERS NASIONAL 2023
Tebar Bibit Ikan dan Tanam Pohon

MAGELANG (KR) - Melepas atau menebar ribuan ekor bibit ikan dan menanam beberapa jenis pohon mewarnai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang dilaksanakan PWI Kabupaten Magelang dengan tema “Memelihara Bumi, Merawat Demokrasi” di sumber mata air Ndas Gending Dusun Ganjuran Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Senin (20/3).

Dalam kesempatan ini Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi, melakukan penanaman Pohon Kalpataru, disusul Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh

KR-Thoha

Pelepasan bibit ikan dilakukan bersama-sama di sumber mata air Ndas Gending.

Wicaksono SIK SH MH, Camat Mertoyudan Daryoko Umar Sing-

gih SIP MM maupun lainnya yang menanam pohon berbeda.

Muhammadiyah Terima PPKM Award

YOGYA (KR) - Muhammadiyah menerima penghargaan PPKM Award yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (20/3). Penghargaan diterima Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman MKes. PPKM Award diberikan sebagai bentuk apresiasi karena telah berkontribusi positif untuk masyarakat dan lingkungan dalam berjuang dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Agus Taufiqurrahman bersyukur atas penghargaan dari Pemerintah terhadap kiprah persyarikatan. Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dalam penanganan Covid-19 telah memberikan layanan dalam penanganan Covid-19 sejak pertama diumumkan Pemerintah 2 Maret 2020. **(Fsy)-d**

Hasil Sambungan hal 1

Menjawab pertanyaan *KR*, apa tidak mungkin muncul pelaku lain karena mereka saling mencokot, menurut Kombes M Iqbal, semua serba mungkin. "Yang jelas, kasus ini tengah diproses penyidik Dit Reskrimsus Polda Jateng," ujarnya.

Sementara mengenai jumlah uang calo rekrutmen masuk Bintara Polri yang mencapai Rp 9,2 miliar, oleh Tim Paminal Mabes Polri dikembalikan kepada Casis bersangkutan. **(Cry)-d**

Bank BPD DIY Mulai Kucurkan KUR Syariah

SLEMAN (KR) - Dalam upaya melakukan peningkatan akses layanan keuangan formal dan literasi melalui dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil di daerah, Kantor Kemenko Perekonomian mengadakan Workshop Keuangan Inklusi. Workshop diikuti calon wirausaha muda, pelaku UMK, anggota Majelis Dakwah Islamiyah DIY serta pengurus pesantren dan masjid. Hadir pula dari Baznas Pusat, Jamkrindo Syariah, Pegadaian Syariah Bank BPD DIY Syariah dan Ketua Majelis Dakwah Islamiyah KH M Choirul Anam.

"Saya kira dalam situasi sekarang perlu segera di-dorong peningkatan produk dan layanan keuangan digital, perluasan jangkauan layanan

KR-Istimewa

Arif Wijayanto menyerahkan pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku usaha mikro/UMK.

keuangan dan penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif," kata Asisten Deputi Keuangan Inklusi dan Keuangan Syariah Kemenjo Perekonomian Er-di-riyo di Boetani Resto and Garden Cebongan Sleman, Senin (20/3).

Sementara Pemimpin Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY

Arif Wijayanto mengatakan, tahun 2023 ini Bank BPD DIY mendapatkan alokasi KUR dari pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun termasuk KUR Syariah.

"Silakan UMK di DIY ini untuk segera mengakses KUR melalui kantor-kantor BPD DIY terdekat," ujarnya. **(Ria)-d**

Warga Sambungan hal 1

Dikatakan Kombes Nuredy, korban datang ke lokasi, Minggu (19/3) petang, kemudian malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, sudah tidak bernyawa. "Ditemukan malam pukul 23.00 WIB, kemudian anggota ke TKP selang 15 menit kemudian dilaporkan pihak manajemen hotel. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke rumah sa-

kit," tambah Nuredy.

Soal informasi yang menyebutkan korban dimutilasi, Nuredy meminta waktu untuk menjelaskan. "Untuk lebih jelasnya, kita menunggu otopsi dokter, baru kita rilis. Karena hasil pengamatan mata manusia dengan hasil otopsi pihak medis, tentunya berbeda," ujar Nuredy. **(Ayu)-d**

Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

TULISAN ini dilatarbelakangi atas ketidaknyamanan penulis terhadap tabiat pejabat publik di Indonesia baru-baru ini. Tidak sedikit pemberitaan negatif mengarah pada pejabat di Indonesia. Sebut saja gaya hidup mewah pejabat publik,

keterlibatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan sebagainya. Apakah ini wajah baru pejabat publik? Publik kurang diakrabkan dengan prestasi dan kinerja pejabat. Sebaliknya publik lebih sering dihebohkan dengan beragam perilaku hingga gaya hidup pejabat publik yang jauh dari ideal. Pertanyaannya, seperti apa idealnya pejabat publik?

Kita awali bahasan dalam lingkup sebuah negara, dimana peran seorang individu seminimnya terbagi menjadi 2 (dua) yakni pejabat dan warga. Dua entitas tersebut sebagai elemen hidup menjaga keberlangsungan negara. Pejabat sejatinya sebatas peran yang diperoleh sebagian individu warga

negara dalam ruang lingkup tertentu, mulai dari jangka waktu tertentu, instansi tertentu, hingga wewenang tertentu. Perilaku seorang pejabat dalam menjalankan jabatannya tentunya terbatas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur jabatan tersebut. Batasan tersebut bukan hanya perihal wewenang maupun tugas pokok dan fungsi pada jabatan tersebut, namun tentunya etika selama menjadi pejabat. Idealnya, seseorang selama mengemban amanah pada jabatan tertentu maka perlu membatasi diri untuk tidak melebihi kapasitas yang diberikan pada jabatan tersebut, sekaligus mengoptimalkan segala

potensi diri untuk menjalankan amanah wewenang pada jabatan tersebut.

Seringkali kita melihat perilaku pejabat berperilaku melebihi kewenangan jabatannya, seolah mereka mampu menciptakan kepatuhan. Para pejabat perlu menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan kepatuhan. Hanya hukum yang mampu menciptakan kepatuhan. Mental diri para pejabat perlu perbarui, perlu ditekankan bahwa pejabat adalah pelayan publik. Mereka diamanahkan sebuah jabatan guna mengakomodasi kepentingan publik.

Pejabat publik lebih dari seorang public figure

maupun artis, namun lebih kepada someone who becomes the public's hope. Bagi publik, pastinya terasa lebih menyakitkan melihat perilaku seorang pejabat publik tak beretika, ingkar janji, karena publik meletakkan harapan dan amanahnya kepada mereka. Wajar melihat publik gencar menghujat tabiat para pejabat yang jauh dari ideal. Seperti apa karakter pejabat yang diidealkan?

Amanah. Tentunya menjadi satu kata tak terbantahkan. Penulis melihat setidaknya ada minimal 3 (tiga) new normal yang dipertontonkan pejabat publik saat ini, yakni: Pertama, money syndrome. Seorang pejabat merasa terpenuhi dari aspek finansial

sehingga dirasa perlu untuk dirinya memamerkan harta kekayaannya, dibanding kinerjanya. Kedua, star syndrome. Perkembangan pemanfaatan media sosial menjadikan seorang pejabat perlu menjaga popularitasnya, lagi-lagi dibanding kinerjanya. Ketiga, power syndrome. Bisa disebut telah menjadi problem turun temurun. Seorang pejabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi melebihi dari hak yang seharusnya diperoleh. Tentunya ketiga new normal tersebut mengindikasikan kondisi jauh dari idealnya seorang pejabat sebagai pelayan publik.

Revolusi mental yang sengaja dipopulerkan di era

UNIVERSITAS
AMIKOM
YOGYAKARTA

Creative Economy Park

Jokowi, semakin tampak nyata sebagai sindiran manis bagi mental para pejabat publik. Harapannya saat ini dan kedepannya, para pejabat publik senantiasa berbenah atas mental dirinya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang ditunjukkan perlu sejalan dengan amanah publik. Pejabat publik sebagai representasi pelayanan publik. Sebaik apapun sistem pelayanan yang dibangun, jika tidak disertai mental yang beretika maka tetap saja tampak gagal. Semoga tulisan ini bermanfaat serta menjaga kita untuk tetap kritis kepada para pejabat publik yang belum amanah.